BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kecenderungan kecurangan akuntansi saat ini menjadi berita utama dalam pemberitaan media yang sering terjadi. Kecenderungan adalah keinginan untuk melakukan kecurangan karena adanya peluang (kesempatan) untuk melakukan kecurangan. Menurut Adinda (2015) kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kecurangan akuntansi memiliki 3 golongan: korupsi, penyalahgunaan aktiva, serta kecurangan didalam laporan keuangan (Tuannakota, 2011).

Organisasi yang memiliki peluang paling besar terjadinya kecurangan *(fraud)* adalah organisasi yang bergerak dibidang keuangan atau di lembaga keuangan. Lembaga jasa keuangan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi karena transaksi keuangan biasanya lebih dominan terjadi di lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non perbankan baik yang berada ditingkat kabupaten ataupun yang berapa ditingkat pedesaan. Salah satu lembaga keuangan yang berada di tingkat pedesaan, khususnya di provinsi Bali adalah lembaga keuangan yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman di Bali. Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat.

Kesadaran dan kemauan bersama itu terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni desa pakraman. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah No. 8/tahun 2002 yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit, untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat monoterisasi di daerah pedesaan.

Saat ini kasus kecurangan atau *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) masih saja terjadi. Tidak sedikit juga ditemukan LPD bermasalah yang akhirnya berujung pada kebangkrutan. LPD di Bali yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat salah satunya LPD di Kabupaten Buleleng. LPD di Buleleng mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yakni dengan terdapatnya 169 LPD yang tersebar disetiap wilayahnya. Namun dibalik pesatnya pertumbuhan dan perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng, dibayangi juga oleh maraknya LPD yang bermasalah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) sebanyak 20 dari 169 LPD di Kabupaten Buleleng dinyatakan macet pada tahun 2021. Pada triwulan I tahun 2021, jumlah LPD macet di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 20 LPD dengan rincian 4 LPD di Kecamatan Seririt, 3 LPD di Kecamatan Busungbiu, 6 LPD di Kecamatan Banjar, 1 LPD di Kecamatan Sukasada, 3 LPD di Kecamatan Buleleng, 1 LPD di Kecamatan Sawan, 2 LPD di Kecamatan Kubutambahan

(www.eksbangsetda.buleleng.go.id). Data kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Kesehatan LPD Di Kabupaten Buleleng Pada Triwulan I Tahun 2021

No.	Kecamatan	Status Kesehatan					
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Lapor
1	Gerokgak	6	1	3	4	-	-
2	Seririt	9	6	4	2	4	-
3	Busungbiu	8	2	3	-	3	-
4	Banjar	4	3	3	1	6	-
5	Sukasada	14	4	2	-	1	-
6	Buleleng	6	5	4	2	3	1
7	Sawan	11	3	3	-	1	-
8	Kubutambahan	9	4	3	4	2	-
9	Tejekula	12	-	3	-	-	-

Sumber: Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Ekbang, 2021

Tidak dapat dipungkiri banyak LPD di Kabupaten Buleleng yang melakukan tindakan kecurangan (fraud). Salah satunya LPD yang berada di Kecamatan Seririt. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) sebanyak 4 dari 25 LPD di Kecamatan Seririt dinyatakan macet pada tahun 2021. Sebagai LPD dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Buleleng. Kecamatan Seririt memiliki 21 desa/kelurahan dengan luas wilayah 11,178 Km2. Dari 21 desa/kelurahan, di Seririt terdapat 25 LPD yang tersebar dimasing-masing wilayahnya (www.eksbangsetda.buleleng.go.id).

Tabel 1.2
Jumlah LPD di Kecamatan Seririt

No	LPD	No	LPD	No	LPD
1	Kalianget	10	Mayong	19	Umeanyar
2	Joanyar Kelodan	11	Bestala	20	Kalanganyar
3	Joanyar Kajanan	12	Munduk Bestala	21	Tegalenga
4	Tangguwisia	13	Gunung sari	22	Banjar Asem
5	Sulanyah	14	Pengastulan	23	Kalisada

6	Seririt	15	Patemon	24	Pangkung Paruk
7	Bubunan	16	Lokapaksa	25	Yeh Anakan
8	Ringdikit	17	Ularan		
9	Rangdu	18	Unggahan		

Sumber: Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Ekbang, 2021

Dari perbandingan jumlah desa/kelurahan dengan jumlah LPD di Seririt, dapat disimpulkan bahwa LPD di Seririt juga berkembang dengan baik. Namun dalam perkembangannya tidak lepas juga dari masalah yang menyebabkan LPD mengalami kerugian yang cukup material. Terbukti dari adanya beberapa kasus kecurangan yang pernah terjadi sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kasus *Fraud* pada LPD di Kecamatan Seririt

No	Kasus	Taksiran Kerugian
1	Kasus penyelewengan dana di LPD Desa Unggahan Kecamatan Seririt pada tahun 2019. Dari hasil penyelidikan dan keterangan dari saksi bahwa modus yang digunakan oknum adalah dengan tidak menyetorkan uang cicilan pelunasan kredit ke LPD dan digunakan untuk keperluan pribadi. Bukti selanjutnya ditemukan saat pengurus mengecek laporan keuangan di LPD Unggahan yang mana seharusnya utang belum lunas dicatat sebagai utang yang sudah lunas melalui catatan kas keluar LPD Unggahan. Selain itu terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan jaminan (Mustofa, 2020).	Kerugian sebesar Rp. 200.000.000
2	Kasus penyelewengan dana LPD oleh ketua LPD Pengastulan atas nama Ketut Sugiarta pada tahun 2019. Dari hasil penyelidikan dan keterangan tersangka bahwa modus yang digunakan oknum adalah dengan mengambil uang di LPD untuk kepentingan pribadi. Beberapa pengurus adat merasakan ada keraguan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus LPD pada rapat pertanggung jawaban bulan Mei sampai bulan Agustus 2019. Akibatnya krama desa pakraman, prajuru desa adat dan juga perbekel desa terus mendesak sampai akhirnya ketua LPD mengakui tindakannya (Suyatra, 2019).	Kerugian sebesar Rp. 160.000.000

3	Kasus penyelewengan dana lembaga perkreditan desa (LPD) Kalianget oleh mantan ketua LPD Kalianget atas nama Ketut Darmada .Kecurangan ini sudah terjadi sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020. Dari hasil penyelidikan dan keterangan tersangka bahwa modus yang digunakan oknum adalah dengan memanipulasi laporan keuangan dan mengambil uang di LPD dengan cara kasbon berulang kali hingga terakumulasi cukup banyak dan digunakan untuk kepentingan pribadi (Zakky, 2020).	Kerugian sebesar Rp. 355.000.000

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat beberapa pengurus LPD di Kecamatan Seririt melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan dalam proses mengelola keuangan LPD. Berdasarkan berita tersebut, penting untuk diketahui hal-hal yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan sehingga nantinya dapat dicarikan solusi agar dapat mencegah dan mengurangi kasus yang berkaitan dengan kecurangan. Berkurangnya kasus kecurangan akan berdampak pada kelancaran aktivitas dalam suatu instansi ataupun organisasi sehingga mampu mencapai tujuan dan cita-cita organisasi.

Motivasi seseorang dalam melakukan tindakan kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi tersebut adalah *fraud triangle theory*. Teori inilah yang digunakan dalam penentuan variabel pada penelitian ini. Variabel yang digunakan merupakan proksi dari unsur-unsur *fraud triangle*, yang terdiri dari tekanan *(Pressure),* peluang *(Opportunity),* dan rasionalisasi *(Rationalization)* (Karyono, 2013).

Tekanan adalah suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk cenderung melakukan kecurangan *(fraud)*. *Locus of control* merupakan pengendalian diri seseorang terhadap peristiwa yang terjadi pada dirinya.

Individu dengan *locus of control* yang rendah merasa tidak mampu dalam mendapatkan dukungan kekuatan yang dibutuhkannya untuk bertahan dalam suatu organisasi, maka mereka akan memiliki potensi untuk mencoba memanipulasi rekan atau objek lainnya sebagai kebutuhan pertahanan mereka (Kreitner, 2014). Maka dari itu peneliti memproksikan variabel *locus of control* terhadap tekanan.

Peluang *(opportunity)* adalah kondisi dimana kesempatan untuk melakukan kecurangan sangatlah besar. Jika LPD tidak mengimplementasikan *good governace* atau tata kelola organisasi dengan baik dan benar maka kemungkinan peluang adanya kecurangan sangat besar adanya. Menurut Arfah (2011) tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi ataupun organisasi tersebut menerapkan manajemen usaha yang baik secara konsisten dan menyeluruh. Maka dari itu peneliti memproksikan variabel *good governace* terhadap peluang.

Rasionalisasi *(Rationalization)* yaitu pertimbangan dari adanya sebuah kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral lainnya (Pramudita, 2013). Pelaku yang melakukan kecurangan tersebut mengganggap hal yang dilakukannya wajar-wajar saja. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka hanya mengambil sedikit harta dari LPD dan tidak merugikan. Pada penelitian ini peneliti mengkaitkan rasionalisasi pada variabel komitmen organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah, (2017) dimana dalam penelitiannya memproksikan rasionalisasi pada variabel komitmen organisasi.

Berdasarkan kasus tersebut maka diperlukan adanya tindakan untuk meminimalisir kecurangan *(fraud)* akuntansi yang terjadi pada LPD di Kecamatan Seririt. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan komitmen

organisasi (Widiutami, 2017). Suatu perusahaan atau LPD sudah pasti mempunyai pegawai, dimana pegawai tersebut harus memiliki komitmen dalam organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan keterlibatan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Ikhsan dkk, 2011). Semakin tinggi komitmen organisasi, maka semakin besar loyalitas, produktivitas, dan tanggung jawab yang lebih terhadap suatu hal yang berkaitan dengan organisasi.

Peneliti menggunakan variabel komitmen organisasi karena komitmen organisasi menunjukkan sejauh mana pegawai tersebut mengenal dan terikat pada sebuah organisasi yang akan menjadikan pegawai tersebut lebih mementingkan instansi tempatnya bekerja dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan instansi lebih baik untuk mencapai tujuannya. Penelitian yang dilakukan (Widiutami, 2017) menyimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh komitmen organisasi, yang menandakan bahwa tingginya komitmen organisasi seseorang pada suatu organisasi membuat tindakan kecurangan akan semakin rendah. Sebaliknya, jika komitmen organisasi seorang pada suatu organisasi rendah maka kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi akan semakin tinggi.

Penelitian Virmayani (2017) juga mendukung hasil penelitian tersebut, dimana komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi. Penelitian Arifah (2017) juga mendukung hasil penelitian tersebut, dimana komitmen organisasi berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi. Namun tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2017) yang mengatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Karena perbedaan hasil penelitian inilah peneliti ingin menguji kembali dan memilih variabel ini. Hal lain yang juga mempengaruhi pemilihan variabel ini adalah kepercayaan karyawan dan nilai-nilai organisasi yang ada, kesetiaan untuk mengabdi pada organisasi dan loyalitas kepada perusahaan. Apabila karyawan memiliki komitmen yang tinggi pada LPD maka tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Selain hal tersebut, pemilihan variabel ini digunakan karena mengacu pada kasus yang telah terjadi di LPD Unggahan. Pada LPD Unggahan kegiatannya tidak sesuai dengan visi dan misi dari LPD dan dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur yang ada di LPD, ini menandakan kurangnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan terhadap tujuan dari organisasi tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi yaitu *locus of control* dari masing-masing individu yang menjadi pengurus dalam suatu organisasi (Wirakusuma, 2019). *Locus of control* merupakan pengendalian diri seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak (Reiss dan Mitra, 1998). *Locus of control* merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya (Lestari, 2010). *Locus of control* dibedakan menjadi dua yaitu *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal (Reiss dan Mitra, 1998). Individu dengan *locus of control* internal percaya bahwa

kesuksesan dan kegagalan didapatkan karena kemampuan dan usaha sendiri. Sedangkan, individu dengan *locus of control* eksternal percaya bahwa kesuksesan dan kegagalan dalam hidupnya disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain seperti keberuntungan, nasib, dan perbuatan orang lain.

Respati (2011) berpendapat bahwa seseorang dengan *locus of control* eksternal dirasakan kurang bertanggungjawab dengan hasil dari tindakannya dibandingkan seseorang dengan *locus of control* internal. Seseorang dengan *locus of control* internal yang tinggi lebih mengenali secara langsung hubungan antara perilaku dan hasil dari tindakannya. Akibatnya, seseorang dengan *locus of control* internal lebih bertanggung jawab dengan hasil dari tindakan atau perilakunya terhadap diri mereka sendiri dan menentukan sendiri mengenai apa yang benar dan salah untuk pedoman perilaku. Oleh karena itu, seseorang dengan *locus of control* internal lebih tidak berpeluang melakukan tindakan kecurangan *(fraud)*. Sebaliknya, seseorang dengan *locus of control* eksternal lebih bertanggung jawab dengan pihak-pihak lain dan faktor-faktor situasional, oleh karena itu mereka lebih berpeluang melakukan tindakan kecurangan *(fraud).*

Penelitian yang dilakukan oleh Asta (2017) yang menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi pada (BPKAD) Kabupaten Buleleng. Namun tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma (2019) yang menyatakan bahwa locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Rahayu (2018) juga mendukung hasil penelitian tersebut, dimana locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi. Karena perbedaan hasil penelitian inilah peneliti ingin menguji

kembali dan memilih variabel ini. Selain hal tersebut, pemilihan variabel ini digunakan karena mengacu pada kasus yang telah terjadi di LPD Kalianget. Pada kasus LPD Kalianget bahwa modus yang digunakan oknum adalah dengan mengambil uang di LPD dengan cara kasbon berulang kali hingga terakumulasi cukup banyak dan digunakan untuk kepentingan pribadi, ini menandakan kurangnya pengendalian diri atau *locus of control* dari oknum yang telah melakukan tindakan kecurangan pada LPD tersebut.

Faktor lain sebagai pemicu terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu organisasi (Tunggal, 2017). Menurut FCGI, *Good Governance* merupakan suatu peraturan mengenai hubungan antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, karyawan maupun pihak intern dan ekstern yang bersangkutan atau suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan instansi atau perusahaan (Safitri, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, *Good Governance* merupakan kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk menciptakan peningkatan pada kualitas laporan keuangan. Selain itu *good governance* juga digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemakaian sumber daya organisasi dengan mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang makmur (Badewin, 2018). Oleh karena

itu, penerapan *good governance* yang optimal akan mencegah adanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Peneliti menggunakan variabel implementasi *good governance* karena melalui penerapan *good governance* secara optimal maka peluang munculnya tindakan kecurangan dapat ditekan sedini mungkin. Hasil penelitian dari Sari (2015) menyimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi pada SKPD di Kabupaten Buleleng dipengaruhi secara negatif signifikan oleh *good governance*. Penelitian Saftarini (2015) dan penelitian Saputra (2015) juga mendukung hasil penelitian tersebut, dimana *good governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi. Selain hal tersebut, pemilihan variabel ini digunakan karena mengacu pada kasus yang telah terjadi di LPD Pengastulan. Pada kasus LPD Pengastulan bahwa kurangnya transparansi laporan keuangan menyebabkan terjadinya kecurangan selain itu oknum mengambil uang di LPD untuk kepentingan pribadi, ini menandakan kurangnya implementasi *good governance* untuk meminimalisir tindakan kecurangan pada LPD tersebut.

Untuk mengembangkan kesimpulan penelitian Suarniti (2019) maka dilakukanlah penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama memakai komitmen organisasi sebagai variabel bebas serta kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel terikat. Perbedaan pada penelitian ini adalah dengan adanya variabel *locus of control* dan implementasi *good governace* sebagai variabel bebas serta variabel terikat yang menspesifikan permasalahan dalam kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt. Penelitian ini mengambil lokasi pada LPD di Kecamatan Seririt dengan alasan peneliti mendapatkan berbagai isu yang

ditelusuri di lapangan terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD di Kecamatan Seririt. Selain itu masih terdapatnya kesenjangan kesimpulan penelitian sehingga perlu agar dilakukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti seebelumnya adalah penggunaan variabel bebas yang berbeda yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi, serta penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda yang mana lokasi penelitian dilakukan pada LPD di seluruh Kecamatan Seririt. Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Komitmen Organisasi, *Locus of Control* dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Seririt ".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah dan *research gap* sebagai berikut :

1. Adanya kasus kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt yaitu LPD Unggahan, LPD Kalianget dan LPD Pengastulan.
2. Penggunaan dana yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain dapat dikatakan sebagai kecurangan *(fraud).*
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel komitmen organisasi, *locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Kurangnya komitmen dalam suatu organisasi dapat menyebabkan timbulnya tindakan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

5. Lemahnya *locus of control* internal dan tingginya *locus of control* eksternal dari masing-masing anggota pada suatu organisasi akan mendorong munculnya tindakan kecurangan (*fraud)* akuntansi.
6. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang belum optimal membuka peluang munculnya tindakan kecurangan (*fraud)* akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pemberian batasan masalah bertujuan agar pembahasan dapat tertuju pada sasaran penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka pengaruh tiga variabel yang meliputi komitmen organisasi, *locus of control* dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Seririt menjadi pembatasan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang terjadi saat ini bahwa banyak kasus terkait dengan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada suatu LPD.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt?
2. Bagaimana pengaruh *locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt?
3. Bagaimana pengaruh implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan *(fraud)* akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt.
2. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan *(fraud)* akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *good governance good governance* terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan *(fraud)* akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh komitmen organisasi, *locus of control* dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada LPD di Kecamatan Seririt dan dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan melakukan kajian atau penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan bidang ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Forensik yang diperoleh selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonsomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi kepustakaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi, *locus of control* dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* akuntansi.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di sektor lembaga keuangan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen dan karyawan pada LPD dalam pengelolaan dana masyarakat.